## HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

NAMA PELAPOR

: -

HARI, TANGGAL

: SELASA, 21 MEI 2024

LOKASI

: KABUPATEN KEBUMEN

ISI ADUAN

: KETIDAKPUASAN TERHADAP PROGRAM PEMBERIAN KERINGANAN POKOK

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA TAHUN 2024

## **PENJELASAN:**

- Bahwa guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan ruang fiskal pembangunan dan meringankan beban masyarakat Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah memberikan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan Dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024.
- 2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 dimaksud, Gubernur Jawa Tengah memberikan keringanan Pokok Pajak dan Denda Pajak sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2019;
  - b. 40% (empat puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2020;
  - c. 30% (tiga puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2021;
  - d. 20% (dua puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2022;
  - e. 10% (sepuluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2023.
- 3. Hasil Cetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB Wajib Pajak Nopol AA 1284 NJ sbb :



- 4. Berdasarkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB Wajib Pajak tersebut diatas, Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB untuk Keterlambatan Tahun 2024 sehingga **tidak berhak** untuk mendapatkan keringanan Pokok Pajak dan Denda Pajak, dikarenakan keringanan Pokok Pajak dan Denda Pajak diperuntukan untuk Tunggakan Tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019.
- 5. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan keterlambatan pembayaran PKB lebih dari satu tahun, sedangkan untuk Wajib Pajak Nopol AA 1284 NJ baru dikenakan keterlambatan PKB untuk tahun jalan.

Demikian, semoga berkenan dan atas perhatiannya terhadap pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di UPPD Kab. Kebumen kami sampaikan terima kasih.

Kebumen, 22 Mei 2023

Mengetahui,

JATEN KEPALA UPPO KAB. KEBUMEN

BODI PHASETYO, SE

NIP 197202262010011002

KASI PKB UPPD KAB. KEBUMEN,

IRAWAN, SIP MM NIP. 19790919200801022